
THE IDEAS OF POLITICAL ETHICS OF SEYYED ALI KHAMENEI: AN ANALYSIS OF THE POLICIES OF AN ISLAMIC LEADER ON A NATIONAL AND INTERNATIONAL SCALE

ANDI NOVRIANSYAH SAPUTRA

Alauddin State Islamic University Makassar

saputraandinovriansyah@gmail.com

Abstract

The need for political ethics in national and international leadership is crucial to clarify the boundaries of political policy enforcement. Seyyed Ali Khamenei has demonstrated these ideas through his national speeches and political decisions as the Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran. This study analyzes the political ethics of Seyyed Ali Khamenei using library research methods and a qualitative approach. It is descriptive-analytical in nature, extracting the core ideas of Seyyed Ali Khamenei from books that detail his life and articles from websites that compile his various speeches, formulating them into this academic work. The political ethics proposed by Seyyed Ali Khamenei focuses on two main themes: unity and justice. Regarding unity, Ali Khamenei views it as a necessity, even a principle that must be steadfastly upheld by the entire Muslim community. Concerning the theme of justice, Seyyed Ali Khamenei implements the concept of *wilāyat*, which is expected to foster love, and equality, and uphold justice for every citizen. According to him, an effective government strengthens the relationship between the leader and the people, and a progressive nation achieves peace and justice for humanity.

Keywords: *Political Ethics, Justice, Policy, Islamic Republic of Iran, Peace, Seyyed Ali Khamenei.*

Abstrak

Gagasan etika politik diperlukan dalam kepemimpinan skala nasional dan internasional untuk memperjelas batasan daripada ranah ketentuan suatu kebijakan politik yang diterapkan. Sayid Ali Khamenei telah menunjukkan gagasan tersebut baik melalui pidato kebangsaan serta keputusan politiknya sebagai pemimpin tertinggi di Republik Islam Iran. Penelitian ini menganalisa etika politik Sayid Ali Khamenei menggunakan metode pustaka dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bersifat dekriptif-analitis, yaitu mengambil pokok gagasan Sayid Ali Khamenei dari buku-buku para peneliti yang membahas secara detail kehidupannya, serta artikel-artikel dari website yang mengumpulkan berbagai pidatonya, untuk dirumuskan menjadi bagian dari penelitian ini. Gagasan etika politik Sayid Ali Khamenei berfokus pada dua tema utama: persatuan dan keadilan. Terkait persatuan, Ali Khamenei ingin menerapkannya sebagai suatu keharusan, bahkan prinsip yang perlu dipegang teguh oleh umat Islam secara keseluruhan. Berkaitan dengan tema keadilan, Sayid Ali Khamenei menerapkan konsep wilayah yang diharapkan bisa mewujudkan rasa cinta kasih, kesetaraan untuk tegaknya keadilan bagi setiap warga negara. Pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang mampu mempererat hubungan antara pemimpin dan rakyat, dan bangsa yang maju adalah yang mampu mewujudkan perdamaian dan keadilan.

Kata Kunci: *Etika Politik, Keadilan, Kebijakan, Republik Islam Iran, Perdamaian, Sayid Ali Khamenei.*

INTRODUCTION

Pasca Revolusi Islam Iran 1978, roda pemerintahan dipimpin langsung oleh Imam Khomeini, seorang pemimpin tertinggi negara sekaligus pemimpin agama di kalangan umat Islam di Iran. Sebelum kepulangannya dari Prancis, Syah Pahlevi dan jajarannya, selaku mitra baik untuk pasukan imperialis Amerika Serikat, telah angkat kaki dari Tehran (id.wikishia.net, n.d.).

Pada diri Sayid Ali Khamenei terdapat kepribadian yang agung, keselarasan antara kecerdasan, keberanian, dan kebijaksanaan. Ia dikenal sebagai seorang *faqīh* (ahli fikih) terkenal di zamannya. Selain itu, ia juga menekuni disiplin ilmu sejarah dan sastra. Sayid Ali Khamenei lahir di kota suci Masyhad, Iran, dari keluarga yang dikenal dekat dengan keahlian di bidang ilmu agama Islam (Khamenei 2004).

Berkat kepiawaian dan kepandaian hasil didikan orang tua, guru-guru, bahkan nashiat penuh semangat kebangkitan dari Imam Khomeini, Khamenei menjalankan dengan sungguh-sungguh jabatannya di *Shurā-ye Enqelāb* hingga akhir aktivitas lembaga tersebut pada tanggal 20 Juli 1980. Ia berpendapat bahwa lembaga dengan fungsi besar seperti Dewan Revolusi harus menempatkan perwakilan dari seluruh lapisan masyarakat, sehingga aspirasi dari umat Islam di Iran dapat tersampaikan kepada pemimpin negara.

Berkat kepiawaiannya melakukan pendekatan-pendekatan progresif ke beberapa politisi untuk membangun Republik Islam Iran yang lebih maju, nama Ali Khamenei pun dicalonkan secara serius oleh *Majlis-e Shurā-ye Eslāmi* atau Dewan Perwakilan Rakyat di Iran. Mereka sepakat dengan suara bulat memilih sang penyambung lidah Imam Khomeini itu untuk menggantikan presiden kedua Republik Islam Iran Muhammad Ali Rajai yang gugur sebagai syahid.

Dua periode jabatan presiden telah dilaksanakannya dengan sangat baik. Sampai akhirnya penunjukkan untuk posisi yang lebih tinggi diamanahkan kepadanya. Meskipun di awal pidato Ayatullah Khamenei sudah berupaya menolak permintaan anggota parlemen atau pemilik suara, tetap saja Akbar Hashemi Rafsanjani yang memimpin agenda pemilihan *Rahbar* (pemimpin tertinggi) saat itu mengesahkan langsung permintaan mayoritas suara di dalam ruangan sehingga terpilihlah Ayatullah Khamenei.

Sudah banyak dampak positif yang ia terapkan ke berbagai bidang sebagai ikhtiar memajukan Republik Islam Iran tanpa harus berpangku tangan pada negara adikuasa Amerika Serikat ataupun Barat. Meski demikian, ia tidak mempunyai niat untuk

mengekspor tindakan revolusi yang telah lalu ke negara-negara Islam, apalagi lewat pemberontakan terhadap pemimpin bangsa sendiri. Justru Sayid Ali Khamenei menginginkan transisi kepemimpinan dilakukan secara damai. Demi menghadirkan para pemimpin dengan misi mencegah ketegangan politik antar negara Islam di Timur Tengah, juga dunia (id.wikishia.net, n.d.). Tahapan menuju kebijakan politik yang lebih moderat diupayakan Ayatullah Khamenei melalui etika politik yang berangkat dari petunjuk Al-Qur'an untuk kehidupan lebih baik.

Ikhtiar politik yang dilakukan olehnya dapat disebut sebagai gagasan baru dalam dunia etika politik Islam. Istilah etika politik populer di Indonesia setelah Romo Franz Magnis Suseno memperkenalkan konsepnya secara utuh dan detail melalui salah satu bukunya berjudul *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (1987) (Franz Magnis-Suseno 1987). Akan tetapi, sebenarnya konsep serupa sudah dipraktikkan lewat kebijakan pemerintahan kolonial Belanda yang disebut "Pax Netherlandica". Namun saat itu masih sebatas penerapan politik etis dan fokusnya pada pemerataan model administrasi baru di daerah-daerah kolonial dengan pusatnya Batavia (sekarang Jakarta) serta adanya peralihan dari sistem pemimpin pribumi ke sistem birokrasi kolonial (Kompas 2020). Etika dalam perilaku politik adalah suatu keharusan yang diukur melalui intuisi.

Sebenarnya, nilai-nilai etika dalam aktivitas kehidupan umat manusia sudah terpatri melalui pendidikan dari sekolah dan lingkungan keluarga, terutama dari orang tua. Akan tetapi, karena masalah yang perlu diatur dalam ranah politik begitu kompleks, maka dibutuhkan moral agama sebagai navigasi jalan yang perlu ditempuh bangsa dan negara selanjutnya. Sayid Ali Khamenei telah menerapkannya baik itu melalui pidato dan hubungan diplomatik dengan negara Islam lainnya. Topik seputar persatuan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat Iran hingga dunia berlandaskan pemikiran Al-Qur'an selalu dikumandangkan. Melihat perdamaian

hidup umat Islam secara menyeluruh adalah cita-citanya sebelum menghembuskan nafas terakhirnya.

Namun, persoalannya saat ini adalah berbagai macam tindakan pelanggaran kode etik pejabat negara, kasus korupsi, hingga penyalahgunaan kekuasaan sering terjadi di berbagai negara di dunia, sehingga sulit untuk mewujudkan persatuan dan keadilan bagi masyarakat secara menyeluruh. Padahal setiap pemimpin atau pemangku kebijakan wajib menjunjung tinggi etika politik dalam aktivitas politiknya. Etika politik penting untuk tetap diaktualisasikan. *Pertama*, otoritas politik bagaimanapun juga membutuhkan legitimasi. Perwujudan legitimasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai, norma moral, hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, penerapan etika politik berarti juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian dan respons atas kebijakan yang telah berjalan. *Ketiga*, sebagai pijakan utama dalam menyelesaikan persaingan kekuasaan dan konflik kepentingan agar menemukan solusi yang adil (Handoyo 2016).

Penyelewengan etika politik dalam suatu negara dapat berakibat pada krisis politik dan ekonomi hingga menimbulkan kekisruhan suatu bangsa atau *chaos* yang berangkat dari aksi protes penduduk setempat. Contohnya yang terjadi di Sri Lanka. Pada tahun 2022, negara itu mengalami peningkatan utang luar negeri yang sangat drastis hingga harga-harga kebutuhan pokok menjadi tidak terkendali. Inflasi pun terjadi, Pemerintah Sri Lanka dinyatakan bangkrut hingga tahun 2023 dan berujung pada mundurnya Presiden Gotabaya Rajapaksa (Amany 2023).

Tentu saja, kemunduran etika politik menjadi faktor dari masalah itu, seperti gagalnya pemerintah dalam membagikan kekuasaan secara adil, pemberlakuan kebijakan yang sewenang-wenang, praktik nepotisme dalam pemerintahan, dan tindakan korupsi oleh kabinet pemerintahan yang begitu terang-terangan tanpa rasa malu sedikit pun. Maka gagasan etika politik dari Sayid

Ali Khamenei sangat diperlukan untuk referensi bagi para pemimpin negara, khususnya yang menganut ajaran Islam sebagai pedoman hidupnya, untuk diterapkan dalam kebijakan negara, baik di skala nasional, dan skala internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi gagasan etika politik Sayid Ali Khamenei dan dampaknya di Republik Islam Iran, serta manfaatnya bagi pemimpin negara-negara Islam. Dengan mengidentifikasi dan memahami etika politik dari perspektif Sayid Ali Khamenei, studi ini juga bertujuan untuk memperjelas penerapan prinsip-prinsip ini dalam kepemimpinan global, menghubungkan teori dengan praktik dalam konteks politik Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang menghimpun berbagai referensi dari buku maupun artikel yang relevan tentang gagasan etika politik Islam Sayid Ali Khamenei. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan untuk memahami fenomena subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, tindakan, motivasi, dan sebagainya secara menyeluruh (Moelong 2018). Penelitian ini bersifat dekriptif analisis (Amirin 1990), yaitu mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari buku-buku para peneliti tentang perjalanan hidup Sayid Ali Khamenei, serta artikel yang relevan, kemudian menganalisis maksud dari gagasan di dalamnya untuk menemukan suatu kesimpulan.

Hasil dari penelusuran sebelumnya, belum ditemukan karya ilmiah atau tulisan yang mengangkat tema tentang etika politik Islam Sayid Ali Khamenei. Namun, ada beberapa hasil tulisan dan buku-buku yang relevan membahas tentang kebijakan politik Sayid Ali Khamenei sebagai referensi bagi penelitian ini. Salah satunya adalah tesis yang diterbitkan di Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, yang ditulis oleh Kurniana dengan judul “Analisis Kepemimpinan Politik Republik Islam Iran Pasca Revolusi (Studi Kasus pada Kepemimpinan Imam Khomeini dan Sayyid Ali Khamenei)” (Kurniana 2020). Isinya membahas tentang perkembangan pola dan gaya kepemimpinan politik di Iran mulai dari prarevolusi hingga

pascarevolusi tahun 1979. Penelitian tersebut berfokus pada gagasan Imam Khomeini hingga kepemimpinan Sayid Ali Khamenei.

Satu tulisan dari laman *english.khamenei.ir* dengan judul *Unity: A recruitment for the Islamic nation*, yang dipublikasi pada tanggal 23 Oktober 2021 juga banyak memberikan inspirasi dalam hasil penelitian ini. Tulisan tersebut berisi narasi tentang perspektif Sayid Ali Khamenei terkait persatuan dalam tubuh umat Islam dan bagaimana cara mencapainya. Referensi utama lainnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah buku berjudul *Fatwa-Fatwa Sayyid Ali Khamenei* yang diterbitkan oleh Humaniora Press (2004) (Khamenei 2004). Berisi tentang pandangan-pandangan penting dari Sayid Ali Khamenei terkait kebijakan politiknya di dalam dan luar negeri. Ia menekankan pentingnya memutuskan hukum dari suatu perkara dengan berlandaskan aturan Al-Qur'an.

RESULTS AND DISCUSSION

Saat membahas etika politik, maka perlu kiranya terlebih dahulu mengetahui definisi masing-masing kata tersebut. Etika secara garis besar membahas tentang sikap kebiasaan atau budaya yang mengatur tingkah laku manusia. Konteksnya dalam filsafat, yaitu berkaitan dengan tingkah laku manusia dipandang dari segi baik dan buruk serta prinsip-prinsip moral yang diyakini secara bersama (Dewantara 2017).

Sementara kata “politik” berarti suatu tindakan untuk menguasai, dalam hal ini terkait pemerintahan suatu negara. Detailnya adalah beragam kegiatan pada suatu sistem negara menyangkut metode dalam menentukan tujuan dari sistem tersebut dan cara menjalankannya (Budi 2011). Apabila menjadi kalimat etika politik, berarti mengacu pada sikap penguasa atau pemimpin—berkaitan dengan aktivitas politik praktis—dalam merumuskan suatu kebijakan dan menjalankannya di tengah publik atau sebagai citra baginya untuk menunjukkan kekuasaan yang dimiliki.

Lebih dekat dengan definisi yang diutarakan oleh Franz Magnis-Suseno bahwa etika politik merupakan tanggung jawab manusia terhadap negara, hukum yang terkait, dan sebagainya (Frans Magnis-Suseno 2016). Jadi, etika politik yang akan diulas terkait tentang sikap dan keputusan Sayid Ali Khamenei selama menjadi pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, serta gagasan penting yang dapat diperoleh dari pengalamannya politiknya.

Gagasannya lebih dekat dengan sumber keislaman karena posisi Ayatullah Khamenei sebagai pemimpin muslim. Pemikirannya kebanyakan berangkat dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Maka, pembahasan etika politik Islam akan sangat relevan untuk menamakan pandangan tersebut sebagai sebuah referensi untuk para politisi muslim lainnya, khususnya di Indonesia.

Topik tentang hubungan antara etika dan politik setidaknya telah ditekuni dengan serius oleh para penulis dan peneliti politik Islam era modern saat ini. Setiap pemikir dan pelaku politik kalangan muslim sebenarnya—disadari atau tidak oleh yang bersangkutan—telah menghasilkan gagasan etika politiknya masing-masing. Meski dengan metode berbeda, prinsipnya tetap amar makruf nahi munkar. Maka, etika politik Islam merupakan konsep atau gagasan berupa kebijakan dari politisi atau penguasa kalangan umat Islam yang bercorak pada peraturan Ilahi dan kebiasaan hidup Nabi Muhammad saw. Kemudian, diterapkan secara menyeluruh agar mencapai tujuan hidup lebih baik.

Selain itu, kriteria pemimpin juga perlu diperhatikan dalam menjalankan roda pemerintahan. Imam Syafi'i pada masa kejayaan pemerintahan Islam menjelaskan secara spesifik bahwa seorang pemimpin harus dalam keadaan merdeka, laki-laki, sehat semua pancaindranya, mujtahid, punya prinsip keadilan, dan dewasa. Namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman, sudah banyak bermunculan pemimpin perempuan yang sesuai dengan kriteria lainnya (Zaini 2021).

Kriteria berikutnya telah tertulis dalam Kitab Shahih karya Imam Muslim, melalui hadis-hadis Nabi Muhammad, yakni seorang pemimpin harus visioner, cerdas, tidak cacat moral, profesional dan punya pemahaman spiritual yang tajam. Setelah mendapatkan kekuasaan, maka wajib hukumnya untuk berlaku adil kepada rakyat, tidak bertindak sewenang-wenang, tidak menyelewengkan jabatan dan menjalankan aturan sesuai perintah Al-Qur'an (Shobron 2012). Kriteria dan fungsi penguasa tersebut bagian tidak terpisahkan dari suatu gagasan etika politik. Hal itu juga menjadi fokus dalam gagasan penting Imam Sayid Ali Khamenei selama memimpin di Republik Islam Iran. Ada dua topik utama yang ditawarkan olehnya, yakni persatuan dan keadilan. Kedua topik itu diterapkan dalam memutuskan kebijakan dan mempertegas sikap politiknya, baik dalam skala nasional hingga internasional. Menurut Khamenei, semua perlu dijalankan dengan mengacu pada perintah Al-Qur'an demi terciptanya keselamatan bagi negerinya.

Gagasan Etika Politik Sayid Ali Khamenei

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, istilah etika politik di Indonesia jauh lebih populer ketika tokoh agamawan dari Katolik, Romo Franz Magnis Suseno lewat buku berjudul *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Disebutkan bahwa perangkat-perangkat dalam sebuah negara perlu dijalankan dengan sebaik mungkin sesuai dengan tuntunan moral. Namun, bagi Franz, kebaikan manusia sebagai manusia dan kebaikan sebagai warga negara selama ini terlihat tidak identik. Maka tidak mudah untuk mengatur masalah manusia sebagai warga negara yang begitu kompleks melalui suatu perangkat pemerintahan (Frans Magnis-Suseno 2016).

Dikutip dari F.B. Hardiman, tinjauan moralitas dari pandangan Jürgen Habermas menggambarkan gagasan etika politik secara mendalam. Menurutnya, etika dalam berpolitik baru bisa berjalan jika ada upaya mempertahankan dinamisnya keutuhan masyarakat

di ruang publik. Perjuangan kesetaraan semacam itu diperlukan, khususnya sejak beberapa filsuf Jerman lainnya memberikan pandangan skeptis terhadap konsep rasionalitas modern dengan misi emansipasi sosialnya (Hardiman et al. 2011).

Menjalankan perangkat kenegaraan demi kemaslahatan umat manusia dan membangun dialektika terhadap kebijakan politis yang diperbuat, sesuai dengan semangat *al-siyāsah* (politik Islam) dari para cendikiawan muslim. Setiap gagasan etika politik telah tercantum dalam dalil-dalil suci. Salah satunya pemimpin yang mengerjakan amal kebaikan atas dasar penghambaannya kepada Allah Swt.

“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: ‘Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri?’” (QS. Fushshilat [41]:33) (Kementerian Agama Republik Indonesia 2012).

Mewujudkan etika dalam berpolitik di dunia Islam merupakan bagian dari kerja dakwah. Hal itu ditunjukkan pula secara konsisten oleh Sayid Ali Khamenei di Republik Islam Iran. Gagasan etika politik yang ia tawarkan secara garis besar mengerucut pada dua tema: persatuan dan keadilan. Terkait persatuan, Ali Khamenei ingin menerapkannya sebagai suatu keharusan, bahkan prinsip yang perlu dipegang teguh oleh umat Islam secara keseluruhan.

Ia menegaskan bahwa persatuan bukan persoalan taktik atau strategi, melainkan prinsip Islam.

“Persatuan tidak boleh dilihat dari perspektif taktis, itu adalah prinsip Islam” (english.khamenei.ir 2021).

Kedekatan antarumat Islam demi mewujudkan persatuan diyakininya sebagai kewajiban dan syarat paling esensial demi mewujudkan sistem berlandaskan Islam. Sang Imam juga telah berikrar akan pentingnya persatuan tersebut segera terwujud, khususnya dalam bidang hubungan politik. Contohnya seperti apa yang telah diperlihatkan oleh para pejuang revolusi Islam, semua

kepentingan dari berbagai elemen menjadi satu karena melihat adanya kesamaan visi untuk membentuk sebuah tatanan sistem yang lebih baik dan berkeadilan.

Bagi Ali Khamenei, persatuan berarti menghadapi musuh dan berempati satu sama lain, lebih mengedepankan kesamaan, tetapi tetap tidak menafikan adanya keberagaman di tengah masyarakat, menjalankan kerja sama untuk hal-hal yang disepakati bersama sehingga mereduksi sifat antagonis dan oposisi antara satu sama lain, serta solid dalam emosional dan politik ketika menghadapi masalah.

Setelah menjadi pemimpin tertinggi pun, Ayatullah Khamenei tetap memberikan kritik dan masukannya terhadap upaya pembangunan nasional oleh pihak eksekutif. Ia ingin setiap pekerjaan di negeri ini dilakukan tanpa menanggalkan moral oleh para politisinya.

“Beberapa mengejek kebijakan agama, tetapi jika kita menghabiskan miliaran untuk proyek pembangunan dan mengabaikan masalah moral, semua pencapaian tidak berarti apa-apa” (Murphy 2008).

Menyandingkan keputusan politis dengan tetap mengedepankan moralitas keagamaan oleh para pemangku kebijakan di Republik Islam Iran dirasa sangat penting bagi Sayid Ali Khamenei. Sebab bangsa yang berhasil dan maju di masa depan adalah yang mempunyai pedoman yang diyakini dapat memberikan keselamatan.

“Bangsa yang menaruh keyakinan kepada Islam, kepada al-Qur'an, dan kepada janji Allah yang berbunyi, ‘*Wal yansurunnallahu man yansuruhi*’ (Dan Allah akan sungguh-sungguh menolong orang yang menolong (agama)-Nya), pasti akan berhasil dan pantang mundur” (Khamenei 2004).

Berkaitan dengan tema tentang keadilan, Sayid Ali Khamenei menerapkan konsep *wilayāt* selama masa kepemimpinannya. *Wilayāt* merupakan kawasan yang diharapkan pemerintahnya bisa mewujudkan rasa cinta kasih, kesetaraan untuk tegaknya keadilan

setiap warga negara. Pemerintahan dilihat sebagai keterikatan hubungan yang dekat antara pemimpin dan rakyat.

Maka dengan begitu muncul rasa simpati, kepedulian yang teramat besar untuk mengabdi dengan sepenuh hati kepada rakyat yang dipimpinnya. Para pemimpin akhirnya akan mengaggap bahwa sumber semua sistem politik berikut amanahnya berasal dari Allah Swt. sehingga tetap memandang dirinya sebagai hamba dan mengabdi kepada-Nya (Khamenei 2004).

Agama menjadi fokus sentral dalam berbagai keputusan dan tindakan yang selalu menjadi referensi para penguasa. Oleh karena itu, di negara Iran sendiri dalam menentukan seorang pemimpin tidak hanya melihat dari sisi kriteria dunia, tetapi juga terkait pemahaman keagamannya. Bagi Ali Khamenei, kriteria tersebut diwujudkan agar pemimpin selanjutnya bisa mewarisi model pemerintahan yang sempurna layaknya kepemimpinan Nabi Muhammad saw. di Madinah (meskipun tidak selalu mendekati) (Khamenei 2004).

“Anda tidak dapat menganggap bahwa Islam akan menyerukan tatanan sosial dengan cara tertentu tanpa membahas masalah pemerintahan dan kepemimpinan dalam agama dan dunia” (english.khamenei.ir 2022).

Merujuk pada apa yang diperbuat Rasulullah saat menjabat sebagai pemimpin negara dan agama, hal pertama yang dilakukannya, yaitu membangun otoritas politik dan sosial, dapat diartikan membangun struktur pemerintahan. Bagaimanapun posisi nabi sebagai Rasul Allah, ia tetap menyeimbangkannya dengan kemaslahatan orang banyak di dunia melalui terbentuknya suatu pemerintahan negara yang berdaulat.

Argumen itu juga digunakan oleh Imam Khamenei untuk menjawab tuduhan dari sejumlah pihak yang menyebut penggabungan antara agama dan urusan negara hanya akan membuat agama rusak. Tetapi menurut Imam, justru Islam adalah agama dakwah, menasihati, mengajak dengan kata-kata, mewujudkan

realitas hukum-hukum Tuhan di tengah masyarakat. Ajaran Islam, bahkan bisa lebih menyebar ke segala penjuru melalui kekuasaan.

Pemerintahan dengan aturan sesuai norma-norma keislaman bersandar pada perintah Al-Qur'an. Maka Sayid Ali Khamenei berpendapat bahwa melaksanakan suatu kebijakan politik sebagai tugas pertama dari semua Nabi Allah. Bahkan, mendirikan pemerintahan Islam adalah impian dari semua sahabat Allah sepanjang sejarah (english.khamenei.ir 2022).

Ayatullah Khamenei mengharapkan gagasan dari Al-Qur'an dan perintah Nabi Muhammad selalu dijalankan sesuai dengan prinsip yang dipegang teguh selama ini, yakni mengimani keduanya. Rahbar Republik Islam Iran itu tidak ingin Islam dijalankan sekadar ritual belaka, karena ada ajaran berupa kebiasaan hidup sehari-hari hingga berkaitan dengan masalah kepemimpinan di dalamnya.

"Agama adalah sebuah program yang komprehensif, bukan program yang hanya mengatur tentang ibadah dan individu manusia. Sebagian beranggapan agama hanya berhubungan dengan program individu, sementara berbagai persoalan sosial, politik, ekonomi dan lainnya berada di luar ranah agama" (www.leader.ir 2021).

Ali Khamenei ingin menyerukan kepada rakyat dan para penguasa agar sistem politik tetap berlandaskan moralitas dan bermuara pada spiritualitas, karena dampaknya akan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang terhimpun dalam kebijakan itu, yakni memperoleh kesempuraan hidup dan surga. Namun, jika dipisahkan antara politik dari moralitas dan spiritualitas, maka akan timbul hasutan duniawi yang begitu keji.

Menduduki singgasana kekuasaan demi memperkaya diri sendiri dan mendorong kepentingan pribadi. Politik jenis ini menurut Ali Khamenei bagaikan hama. Tindakan seperti itu menyusahkan para politisi yang bekerja di bawah kepemimpinannya dan merusak kehidupan sehari-hari rakyatnya (english.khamenei.ir 2018).

Penerapan Etika Politik Terhadap Kebijakan Skala Nasional dan Internasional

Ali Khamenei dengan gagasan etika politik Islam telah memberikan progres perkembangan yang signifikan untuk sebuah negara yang berdiri independen, yaitu tidak terlalu memihak dengan dunia timur dan tidak pula tendensius ke dunia barat. Dua tema besar, yakni persatuan dan keadilan, diterapkan secara menyeluruh dalam skala nasional dan internasional. Awalnya, kebijakan politik yang dijalankan olehnya dinilai banyak pengamat terlalu memaksakan diri untuk mewarisi jabatan penting negara kepada para orang-orang asuhan Imam Khomeini, daripada memutus kepentingan masa lalu dan memulai pendekatannya sendiri. Tapi dalam beberapa kasus saat masih menjabat sebagai presiden, Sayid Ali Khamenei memberikan orang dari luar golongan tersebut untuk memutuskan kebijakan alternatif, contohnya kebijakan Rafsanjani antara lain memulihkan hubungan dengan Arab Saudi, dan menentukan posisi opisisi atau melawan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Israel (Sadjadpour 2009).

Etika politik yang pertama kali dikedepankan dalam skala nasional oleh Sayid Ali Khamenei di masa kepemimpinannya di mulai dari memperkuat rasa persatuan dan persaudaraan satu sama lain. Maka dari itu, Ali Khamenei sangat menolak keras adanya perpecahan di tengah umat Islam serta rakyat Iran. Konsekuensinya akan sangat merusak bangunan persaudaraan antar manusia dan dapat menjadi sasaran utama para musuh asing untuk mengadu domba rakyat di dalam negeri.

Menurut Ali Khamenei, perpecahan menyebabkan moralitas, semangat, kekuasaan, kebijakan, dan keadilan tiap elemen masyarakat runtuh. Sehingga ia meminta seluruh rakyat dan kaum muslimin untuk memegang prinsip dalam kehati-hatian terhadap gejala perpecahan melalui Surah Al-Anfāl ayat 46 (english.khamenei.ir 2021) yang berbunyi:

“Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”, (QS. Al-Anfāl [8]:46) (Kementerian Agama Republik Indonesia 2012).

Merujuk tafsir singkat Kementerian Agama RI, ayat 46 menjelaskan perintah kepada orang-orang mukmin untuk senantiasa menghiasi diri dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Menaati Allah dan Rasul-Nya berarti menghindari sikap berselisih atau saling berdebat karena itu memberikan dampak persinggungan dan hilangnya kekuatan antarsesama umat Islam sehingga tidak berdaya lagi (Kementerian Agama Republik Indonesia 2012).

Namun, ada satu kunci dalam ayat tersebut agar keutuhan dan persatuan tetap terjaga, yaitu sabar. Kaum muslimin diminta tetap bersabar dalam situasi dan kondisi apa pun. Pertolongan Allah akan selalu hadir bagi orang-orang yang senantiasa bersabar. Lewat sabar, setiap manusia punya keberanian untuk mempertahankan kebenaran, kesungguhan dan semata-mata dilakukan atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya (tafsirweb.com, n.d.).

Sabar dalam pandangan Sayid Ali Khamenei tentu bukanlah tindakan yang bersifat pasif. Manusia di samping menunjukkan sikap sabar, juga mendorong adanya upaya serius dan progresif agar persatuan internal kaum muslimin bisa segera terwujud sesuai dengan bingkai moralitas Qur’ani. Ayatullah Khamenei menginginkan etika dalam persatuan dengan tindakan nyata, bukan sekadar slogan.

“Kami sudah menasihati mereka dan sekarang pun kami mengimbau supaya persatuan yang bangsa yang besar dan bersatu ini jangan sampai goyah. Memisahkan bangsa ini antara satu sama lain, sama halnya dengan melayani musuh bangsa ini. Jika bangsa yang besar dan matang ini memelihara persatuan nasional, niscaya akan tercipta peluang persatuan bangsa-bangsa lain” (Khamenei 2004).

Ali Khamenei berambisi agar persatuan antar umat Islam dan umat manusia secara menyeluruh itu dimulai dari negara Iran. Mereka harus menjadi contoh melalui kebijakan nasionalisme berlandaskan sistem Islam bisa menghadirkan peradaban paling menonjol di muka bumi. Harapan peradaban dari Ali Khamenei tentu bukan sekadar di dunia saja, tetapi bisa bernilai amal kebaikan hingga mengantarkan mereka semua ke surga-Nya.

Etika politik menghadirkan gagasan serta upaya penguasa dalam menjalankan tanggung jawab dan tugas terhadap negara, hukum terkait, dan dalam semua unsur kenegaraan. Menunjukkan etika dalam berpolitik berarti menghadirkan keharmonisan seseorang atau antarkelompok sosial politik—termasuk rakyat—dalam menjalankan amanah. Bila mengartikannya dengan Islam, berarti harus sesuai dengan ayat-ayat suci yang mengedepankan rasa aman bagi sesama.

Menegakkan hukum sesuai dengan aturan moral merupakan bagian dari fokus Sayid Ali Khamenei untuk menjaga keamanan dan ketertiban rakyat Iran, seperti memerintahkan aparat keamanan dan kepolisian untuk menindak tegas pengacau keamanan di tengah masyarakat. Pelaku dari pembuat kekacauan menurut Ali Khamenei tidak bisa hanya diberikan hukuman penjara semata, tetapi perlu ada efek jera lainnya sesuai perintah dari Al-Qur'an.

Imam Khamenei melihat penerapan hukum Ilahi jauh memberikan pengaruh besar terhadap pelaku, juga kepada orang-orang yang berniat untuk menjadikan perbuatan semacam itu sebagai profesi sehari-harinya. Ikhtiar itu tetap dilakukannya hingga saat ini meskipun dunia memandangnya sebagai keputusan yang tabu. Tidak hanya aparat keamanan saja, ia juga memberikan pesan serupa kepada setiap instansi atau lembaga pemerintahan di Republik Islam Iran untuk senantiasa waspada dan bertanggung jawab terhadap keamanan lingkungan kerja masing-masing (Khamenei 2004).

Selain fokus pada kemajuan, persatuan, dan keadilan di dalam negeri, Sayid Ali Khamenei mendorong pula agar Iran punya

pengaruh dalam skala internasional. Setidaknya ada tiga komponen penting untuk memperluas pengaruh Iran, seperti apa yang tertulis dalam buku *Modern World Leaders: Ali Khamenei* (2008) (Murphy 2008).

Hal pertama yang menjadi fokus Republik Islam Iran pascarevolusi adalah membuat proyeksi terkait hubungan Iran dan negara Islam lainnya demi mencari titik persamaan untuk diperjuangkan bersama. Langkah ini diperjuangkan untuk menghilangkan rasa kekhawatiran dari negara-negara Islam terhadap pencapaian Iran saat ini. Contohnya menjelaskan tentang urgensi dan kegunaan pengembangan nuklir. Semua negara Islam harus melihat perkembangan tersebut sebagai pencapaian milik seluruh umat Islam di dunia. Menurut Sayid Ali Khamenei, ini juga sebagai peringatan halus agar orang-orang Arab tidak selalu mengambil kerja sama dengan Amerika Serikat, terutama dalam misi yang merugikan negara Arab lainnya. Komponen penting kedua, yaitu meyakinkan setiap umat Islam bahwa Iran dapat menjadi kendaraan terbaik untuk menyebarluaskan dan memperluas pengaruh ajaran Islam *rahmatan lil 'ālamīn* (Murphy 2008).

Pengaruh atas Revolusi Islam Iran tahun 1979 sempat menjadi lokomotif terbentuknya kerja sama antarkelompok besar kaum muslimin saat kekuasaan di Palestina berhasil dipegang oleh Hamas, Ikhwanul Muslimin di Mesir, dan para pengikut Syiah di Irak berbondong-bondong menginginkan revolusi di tengah tuntutan pemilu yang demokratis. Kemudian, komponen penting ketiga ditegaskan oleh Ayatullah Khamenei bahwa hegemoni regional membentuk kombinasi pengaruh politik dan budaya dengan dukungan militer yang tidak konvensional (seperti milisi) sehingga terbuka untuk Iran menyuarakan pendapat terhadap masalah politik dan keamanan di kawasan sulit di Timur Tengah (Murphy 2008).

Pascarevolusi, Iran telah menunjukkan unsur politik luar negeri yang telah membedakannya dari gaya politik sebelumnya. Secara singkat, ada 4 poin (Manucehri 2019) yaitu:

-
1. Penegasan atas menjaga kemerdekaan dan kemandirian negara dan tidak bergantung kepada kekuatan-kekuatan dunia.
 2. Melindungi dan mendukung hak-hak kaum muslimin dan negara-negara lemah di seluruh dunia.
 3. Tesis ekspor revolusi.
 4. Mendukung dan melindungi perlawanan-perlawanan rakyat Palestina.

Jika melihat situasi pemerintahan Iran saat ini yang mulai bergerak ke arah moderat, baik pemimpin tertinggi hingga pihak legislatif, sudah tidak lagi berambisi untuk mengekspor catatan sejarah revolusi mereka kepada negara-negara Timur Tengah. Sayid Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi hanya ingin melihat terwujudnya dua tema penting dari gagasan politik yang diulas sebelumnya, yakni persatuan dan keadilan untuk semua negara dengan mayoritas penduduk umat Islam.

Berdasarkan Pasal 154, Iran tidak ingin ikut campur dengan urusan dalam negeri negara-negara lain. Akan tetapi, tetap memberikan dukungan kepada kaum lemah dan tertindas di berbagai belahan dunia. Hal ini cukup berbeda dengan semangat yang diusung oleh pemimpin revolusi Imam Khomeini. Sejak awal ia mempunyai ide untuk memperluas semangat revolusi kepada semua negara-negara Islam dengan semangat persatuan, kesetaraan, dan keadilan seperti yang dikutip dari *Sistem Politik Republik Islam Iran: Sebuah Model Penyelenggaraan Politik Ilahi*, Imam Khomeini mengatakan:

“Kita harus melakukan pembelaan terhadap kelompok tertindas dunia. Kita harus berusaha untuk menyebarkan revolusi kita ini ke dunia dan hendaknya menyingkirkan pikiran bahwa kita tidak akan menyebarkan revolusi ini, karena Islam tidak membeda-bedakan negara-negara Islam ini dan menjadi pembela serta pelindung seluruh kaum tertindas dan lemah dunia” (Manucehri 2019).

Meski begitu, model gagasan Imam Khomeini tersebut tetap relevan untuk disebarluaskan kepada penduduk Palestina yang masih terjajah oleh pasukan Zionis Israel. Pemikiran revolusi menjadi kunci dalam membangkitkan kemerdekaan serta perlawanan rakyat Palestina untuk melakukan sebuah perubahan besar. Bahkan, pasca Revolusi Islam Iran, pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menjadi petinggi pertama yang mengunjungi Iran dan diberikan kantor perwakilan di lokasi yang sebelumnya ditempati oleh perwakilan Israel. Hingga sekarang, sikap untuk membela kemerdekaan warga Palestina tidak berubah oleh pemerintah Iran. Sayid Ali Khamenei pernah menyebutkan beberapa nama tokoh pemimpin Timur Tengah yang pernah berjuang untuk tujuan serupa. Ia sampaikan dalam sebuah pidato di hadapan para ulama di Qom tahun 2006.

“Kami memegang sikap adil dan logis tentang masalah Palestina. Beberapa dekade lalu, negarawan Mesir, Gamal Abdel Nasser mengatakan bahwa rakyat Mesir akan membuang Yahudi, para perampas tanah Palestina ke laut. Beberapa tahun kemudian, seorang pemimpin yang banyak dibenci oleh tokoh Arab justru menyatakan keinginannya untuk membakar setengah dari tanah Palestina (yang diduduki Israel). Kami percaya, menurut prinsip Islam kami, bahwa tidak membuang orang Yahudi ke laut atau membakar setengah tanah Palestina adalah hal logis dan masuk akal. Posisi kami adalah rakyat Palestina harus kembali mendapatkan haknya. Palestina milik Palestina, nasib Palestina juga harus ditentukan oleh rakyat Palestina” (Sadjadpour 2009).

Melihat kutipan pidato tersebut, tampak jelas Ali Khamenei tidak mengambil langkah radikal seperti para pendahulu dalam memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina. Ia yakin masih ada upaya perjanjian geopolitik yang bisa mengakomodasi kepentingan rakyat Palestina secara menyeluruh dan mendapatkan hak kemerdekaannya di mata seluruh dunia.

Selama kurang lebih 33 tahun menjabat sebagai Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Khamenei sudah menyaksikan berkali-kali penderitaan rakyat Palestina, terutama di Gaza yang masih ditindas oleh pasukan Zionis Israel. Jika terus memaksakan keinginan agar semua wilayah di Yerusalem (termasuk ditempati negara Israel) harus diserahkan kepada Palestina merupakan langkah yang mustahil, maka tidak salah juga jika menggunakan dua opsi perjanjian internasional Islam atau *siyāsah dawliyah* (Suntana 2015), yakni perjanjian berdampingan secara damai, dan perjanjian ekstradisi.

Perjanjian berdampingan secara damai, dalam bahasa ilmu ketatanegaraan Islam disebut dengan perjanjian bertetangga secara baik. Jika konteksnya hubungan diplomatik, berarti kesepakatan antara dua negara atau lebih yang bertetangga untuk saling berhubungan baik dan tidak saling mengganggu. Kesepakatan itu harus dijalankan secara konsisten dan menghormati perbatasan negara lain. Jenis perjanjian tersebut merupakan salah satu prinsip dalam hubungan internasional Islam. Apabila sudah terikat dengan prinsip bertetangga baik, maka tiap negara harus menyelesaikan masalah internasionalnya, seperti menjaga perbatasan wilayah dengan cara perundingan atau negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama serta tidak mengedepankan tindakan militer (Suntana 2015).

Kemudian, perjanjian ekstradisi, yaitu kesepakatan antara dua negara yang ingin menempuh jalan damai dengan cara menyerahkan seseorang atau kelompok sumber masalah agar diadili atas perbuatannya. Hukuman diputuskan oleh pengadilan negara yang meminta ekstradisi. Ini sebenarnya upaya terakhir jika ingin dua negara tetangga hidup dalam keadaan damai tanpa ada lagi perselisihan atau pertikaian antara mereka sehingga membuat banyak korban berjatuhan. Perjanjian ekstradisi efektif untuk menghilangkan tindak kejahatan kemanusiaan secara langsung dari suatu wilayah.

Perjanjian serupa pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. yang dituangkan dalam Perjanjian Hudaibiyyah. Saat itu, Pemerintahan Madinah diminta untuk mengembalikan penduduk Makkah yang datang ke Madinah. Secara eksplisit, hal ini menunjukkan bahwa dalam ajaran politik luar negeri, Islam memperbolehkan negara-negara asing meminta kembali rakyatnya dengan alasan tindakan kurang menyenangkan yang mereka lakukan di dalam negeri (Suntana 2015).

Konsistensi dan perimbangan kebijakan dalam dan luar negeri oleh Sayid Ali Khamenei menunjukkan kesetiaannya atas apa yang diyakini sebagai kebenaran, khususnya terkait perintah Al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad beserta para Ahlulbait. Namun, ada pula situasi di mana ia menerapkan konsep "kepentingan", sesuatu yang pertama kali dimunculkan usai dirinya menjabat sebagai pemimpin tertinggi Republik Islam Iran dalam pemikiran politik Syiah.

Konsep kepentingan itu berlaku apabila terdapat misi sesuai dengan kepentingan penguasa untuk segera diterapkan (Khalaji 2023). Walaupun kepentingan yang dimaksud dianggap tidak sesuai dengan perintah hukum Islam, dampaknya harus memberikan rasa keadilan dan persatuan. Agar prinsip kepentingan berada di jalur yang benar, dibentuklah Dewan Kepentingan untuk membahas keputusan baru menggantikan peraturan lama dengan syarat-syarat tertentu.

Ayatullah Khamenei tetap punya pengaruh untuk memperluas ide dan gagasan etika politik di seluruh negara dengan mayoritas penduduk umat Islam meskipun sudah tidak lagi berada dalam bagian eksekutif pemerintahan. Terutama dalam rangka mewujudkan perdamaian dan keadilan umat manusia. Jika mampu menerapkannya, maka menurutnya pemerintahan tersebut dapat berjalan sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh para nabi (english.khamenei.ir 2022). Apalagi selama menjabat sebagai pemimpin tertinggi, ia secara bertahap terus menunjukkan perluasan otoritasnya atas kebijakan luar negeri dan harus melalui restunya

pula kebijakan itu hendak dijalankan(Bazoobandi, Heibach, and Richter 2023).

CONCLUSION

Penelitian ini menguraikan gagasan etika politik Sayid Ali Khamenei yang berfokus pada persatuan dan keadilan dalam Islam, yang ia anggap sebagai prinsip fundamental dan bukan sekadar strategi. Melalui kepemimpinannya, Sayid Ali Khamenei menunjukkan bagaimana agama Islam dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan politik yang tidak hanya dalam konteks domestik, tetapi juga dalam memperluas pengaruh Iran secara global. Walaupun penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal jumlah referensi, kontribusinya dalam membahas kebijakan dan etika politik dari perspektif Ali Khamenei memberikan dasar yang kuat untuk penelitian lebih lanjut. Diharapkan, penelitian ini dapat menjadi pijakan untuk studi mendalam yang lebih mendetail dan konkret mengenai kebijakan politik Khamenei sehingga memperkaya pemahaman tentang integrasi antara agama dan kekuasaan dalam konteks global.

REFERENCES

- Amany, Farah Azzah. 2023. "Analisis Faktor Penyebab Kegagalan Pemerintah Sri Lanka Tahun 2022." Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Amirin, M. 1990. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Bazoobandi, Sara, Jens Heibach, and Thomas Richter. 2023. "Iran Foreign Policy Making: Consensus Building of Power Struggle?" *British Journal of Middle Eastern Studies*.
- Budi, Setyo. 2011. "Budaya Politik di Indonesia." 2011. <http://budisma1.blogspot.com/2011/08/budaya-politik-di-indonesia.html>.

- Dewantara, Agustinus W. 2017. *Filsafat Moral: Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia*. Yogyakarta: Kanisius.
- english.khamenei.ir. 2018. “6 Acts of Imam Ali (as) That Prove Politics and Ethics Can Be Combined.” February 26, 2018. <https://english.khamenei.ir/news/5492/6-Acts-of-Imam-Ali-as-they-prove-politics-and-ethics-can-be>.
- . 2021. “Unity: A Requirement for the Islamic Nation.” 2021. <https://english.khamenei.ir/news/8733/Unity-A-reqruirement-for-the-Islamic-nation>.
- . 2022. “The Perfect Model of Governance.” October 11, 2022. <https://english.khamenei.ir/news/9205/The-perfect-model-of-governance>.
- Handoyo, Eko. 2016. *Etika politik Edisi Revisi*. Revisi. Semarang: Penerbit Widya Karya Press.
- Hardiman, F. Budi, Robertus Robert, A. Setyo Wibowo, Thomas Hidya Tjaya, and Bagus Takwin. 2011. *Empat Esai Etika Politik*. Jakarta: srimulyani.net.
- id.wikishia.net. n.d. “Sayyid Ali Husayni Khamenei.” https://id.wikishia.net/view/Sayyid_Ali_Husayni_Khamenei. Accessed April 1, 2023. https://en.wikishia.net/view/Sayyid_Ali_Husayni_Khamenei.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2012. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Madinatul Ilmi.
- Khalaji, Mehdi. 2023. *The Regent of Allah: Ali Khamenei's Political Evolution in Iran*. Washington DC: The Washington Institute for Near East Policy.
- Khamenei, Sayid Ali. 2004. *Fatwa-Fatwa Sayid Ali Khamenei Terhadap AS, Israel Dan Sekutunya*. Edited by Misbach Hidayat and Khairul Umam. Jakarta: Humaniora Press.
- Kompas. 2020. “Politik Etis: Tujuan dan Latar Belakang.” February 25, 2020. <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2020/02/25/080000069/politik-etis-tujuan-dan-latar-belakang>.

- Kurniana. 2020. "Analisis Kepemimpinan Politik Republik Islam Iran Pasca Revolusi (Studi Kasus Pada Kepemimpinan Imam Khomenei Dan Sayyid Ali Khamenei)." Jakarta: Universitas Indonesia.
- Magnis-Suseno, Frans. 2016. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Magnis-Suseno, Franz. 1987. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Manucehri, Abbas. 2019. *Buku Sistem Politik Republik Islam Iran: Sebuah Model Penyelenggaraan Politik Ilahi*. Yogyakarta: RausyanFikr Institue.
- Moelong, Lexy J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Murphy, John. 2008. *Modern World Leaders Ali Khamenei*. Infobase Publishing.
- Sadjadpour, Karim. 2009. *Reading Khamenei: The World View of Iran's Most Powerful Leader*. Carnegie Endowment for International Peace.
- Shobron, Sudarno. 2012. "Strategi Dan Etika Berpolitik Dalam Islam (Kajian Terhadap Kitab Shahih Muslim)." *Ishraqi* 10 (1): 1.
- Suntana, Ija. 2015. *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- tafsirweb.com. n.d. "Surat Al-Anfal Ayat 46." Tafsirweb.Com. Accessed April 3, 2023. <https://tafsirweb.com/2912-surat-al-anfal-ayat-46.html>.
- www.leader.ir. 2021. "Pidato 27 Rajab Imam Ali Khamenei." March 11, 2021. <https://www.leader.ir/id/content/24928/Pidato-27-Rajab-Imam-Ali-Khamenei>.
- Zaini, Muhammad. 2021. "Kriteria Pemimpin Dalam Al-Qur'an Dan Aplikasinya Pada Masyarakat Kemukiman Lamgarot Aceh Besar." *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 6 (1): 50.